



# PENGUATAN PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

KEMENKUMHAM TAHUN 2023

Disampaikan Oleh:

DONY HARSO, S.IP., M.Si.

Sandiman Ahli Madya, Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Pusat, Deputi III BSSN

*Jakarta, 20 November 2023*



# OUTLINE



01

Standar Fungsional JDIH

02

Dasar Hukum Penerapan JDIH

03

Peraturan BSSN No. 8/2020 tentang  
Sistem Pengamanan dalam  
Penyelenggaraan Sistem Elektronik

04

Peraturan BSSN No. 4/2021 Standar  
Manajemen Keamanan Informasi  
dan Prosedur SPBE

## Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional pada Pasal 3:



1. Menjamin terciptanya Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya.
2. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah
3. Mengembangkan kerja sama yang efektif antara Pusat jaringan dan Anggota jaringan serta antar sesama Anggota jaringan dalam rangka penyediaan dokumentasi dan informasi hukum
4. Meningkatkan kualitas pembangunan hukum nasional dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud ketatapemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, dan bertanggung jawab



# DASAR HUKUM PENERAPAN JDIIH



**UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik**



**UU No. 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi Publik**



**Perpres No. 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum**



**Perpres No. 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan**

# PERATURAN BSSN NO 8/2020 TENTANG SISTEM PENGAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN SISTEM ELEKTRONIK



PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA  
NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG  
SISTEM PENGAMANAN DALAM PENYELENGGARAAN  
SISTEM ELEKTRONIK

**Penilaian Indeks KAMI**

Bagian Kedua  
Persiapan Penerapan SMPI

Pasal 12

- (1) Untuk mempersiapkan penerapan SNI ISO/IEC 27001 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara Sistem Elektronik dapat melakukan penilaian berdasarkan Indeks KAMI.
- (2) Ketentuan mengenai Indeks KAMI dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB III  
PROSES PENILAIAN MANDIRI DAN KATEGORI  
SISTEM ELEKTRONIK

Pasal 6

- (1) Kategori Sistem Elektronik berdasarkan asas Risiko terdiri atas:
  - a. Sistem Elektronik strategis;
  - b. Sistem Elektronik tinggi; dan
  - c. Sistem Elektronik rendah.
- (2) Sistem Elektronik strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Sistem Elektronik yang berdampak serius terhadap kepentingan umum, pelayanan publik, kelancaran penyelenggaraan negara, atau pertahanan dan keamanan negara.
- (3) Sistem Elektronik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Sistem Elektronik yang berdampak terbatas pada kepentingan sektor dan/atau daerah tertentu.
- (4) Sistem Elektronik rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Sistem Elektronik lainnya yang tidak termasuk pada ayat (2) dan ayat (3).

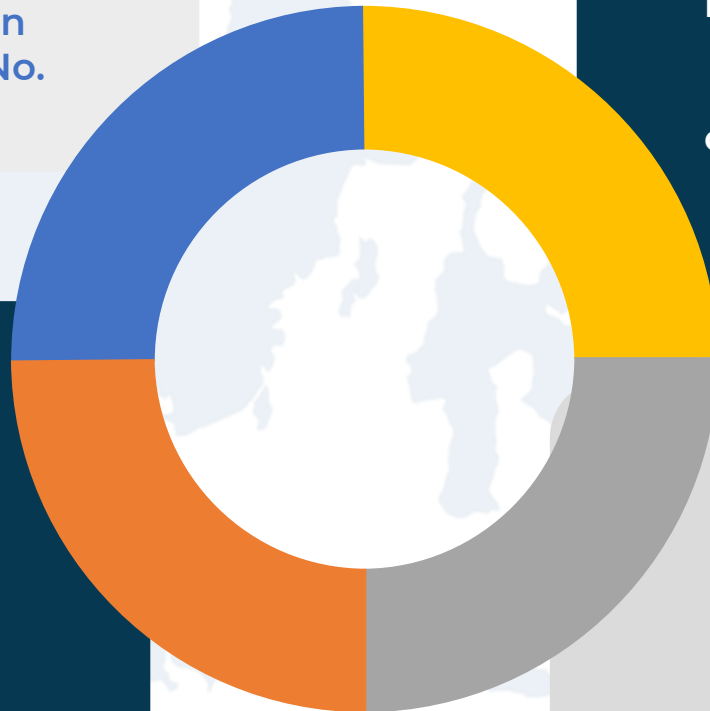




## 3 KATEGORISASI SE

- Terdapat Kewajiban PSE dengan Kategorisasi SE sesuai Perban No. 8 Tahun 2020

- SE Kategorisasi Tinggi:
  - SNI ISO/IEC 27001 dan/atau standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN; dan
  - standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga.



- SE Kategorisasi Strategis:
  - SNI ISO/IEC 27001;
  - standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN; dan
  - standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh Kementerian atau Lembaga.

- SE Kategorisasi Rendah:
  - SNI ISO/IEC 27001; atau
  - standar keamanan lain yang terkait dengan keamanan siber yang ditetapkan oleh BSSN.

# DOMAIN PENILAIAN INDEKS KAMI



- 01** **Tata Kelola Keamanan Informasi**  
Bagian ini mengevaluasi kesiapan bentuk tata Kelola keamanan informasi beserta instansi/fungsi, tugas dan tanggung jawab pengelola keamanan informasi
- 02** **Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi**  
Bagian ini mengevaluasi kesiapan penerapan pengelolaan risiko keamanan informasi sebagai dasar penerapan strategi keamanan informasi
- 03** **Kerangka Kerja Keamanan Informasi**  
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan dan kesiapan kerangka kerja (kebijakan dan prosedur) pengelolaan keamanan informasi dan strategi penerapannya.
- 04** **Pengelolaan Aset Informasi**  
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan pengamanan terhadap aset informasi, termasuk keseluruhan siklus penggunaan aset tersebut.
- 05** **Teknologi dan Keamanan Informasi**  
Bagian ini mengevaluasi kelengkapan, konsistensi dan efektivitas penggunaan teknologi dalam pengamanan aset informasi

# INSTRUMEN INDEKS KAMI

## Indeks KAMI (Keamanan Informasi)

Biodata Identitas  
Responden/PSE  
Penilaian Indeks KAMI

Responden:  
Satuan Kerja  
Direktorat  
Departemen

Alamat 1  
Alamat 2  
Kota Kode Pos

(Kode Area) Nomor Telpon  
user@departemen\_responden.go.id  
HHBB/TTTT

Skor Kategori SE : 10 Kategori SE Rendah

Hasil Evaluasi Akhir: **Tidak Layak**

Tingkat Kelengkapan Penerapan Standar ISO27001

Tata Kelola	: 0	Tk Kematangan	I
Pengelolaan Risiko	: 0	Tk Kematangan	I
Kerangka Kerja Keamanan Informas	: 0	Tk Kematangan	I
Pengelolaan Aset	: 0	Tk Kematangan	I
Teknologi dan Keamanan Informasi	: 0	Tk Kematangan	I
Pengamanan Ketenabatan Pihak Ke	: 0%		
Pengamanan Layanan Infrastruktur	: 0%		
Perindungan Data Pribadi	: 0%		

Kategorisasi SE

Hasil Evaluasi

Tingkat Kelengkapan

Hasil perhitungan tiap area dan tingkat kematangan

Hasil perhitungan suplemen

Dashboard Hasil Akhir  
Penilaian Indeks KAMI  
(Web Chart)



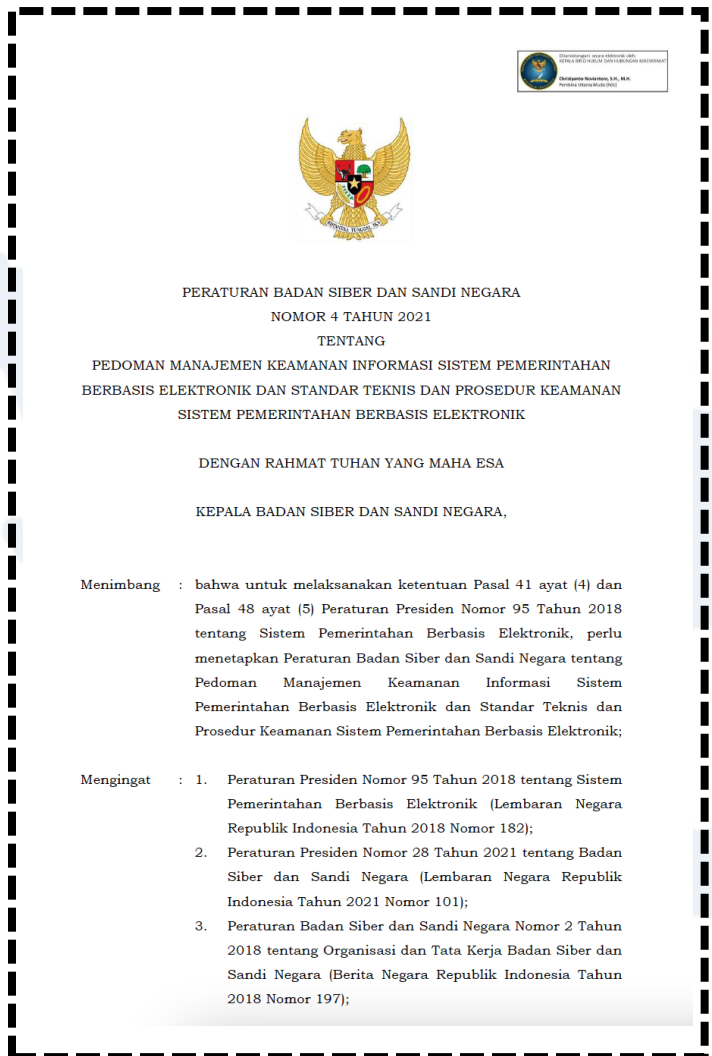
Menampilkan kepatuhan terhadap ISO 27001



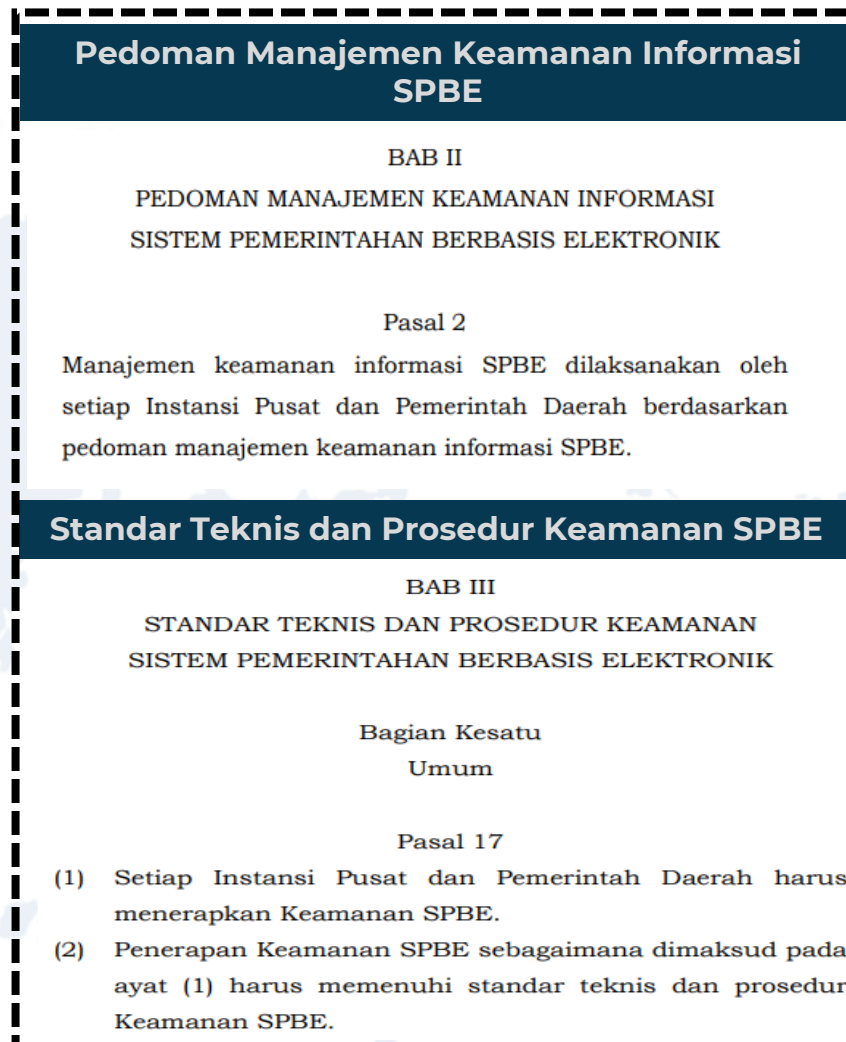




# PERATURAN BSSN NO 4/2021 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE DAN STANDAR TEKNIS DAN PEDOMAN KEAMANAN SPBE



The image shows the cover of the official regulation document. It features the Garuda Pancasila emblem at the top center. Below the emblem, the text reads: "PERATURAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DAN STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK". Below this, it says "DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA,". At the bottom, there are two sections: "Menimbang" and "Mengingat", each followed by a list of references to other regulations and laws.



This block summarizes key provisions from the regulation. It is divided into two main sections: "Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE" and "Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE".

**Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE**

**BAB II**  
**PEDOMAN MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Pasal 2**  
Manajemen keamanan informasi SPBE dilaksanakan oleh setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.

**Standar Teknis dan Prosedur Keamanan SPBE**

**BAB III**  
**STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 17**

- (1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
- (2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.



# PENERAPAN SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI SPBE



**Penentuan Ruang Lingkup**



**Penetapan Penanggung Jawab**



**Perencanaan**



**Dukungan Pengoperasian**



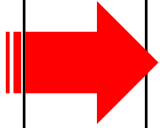
**Evaluasi Kinerja**



**Perbaikan Berkelanjutan**

# STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN SPBE

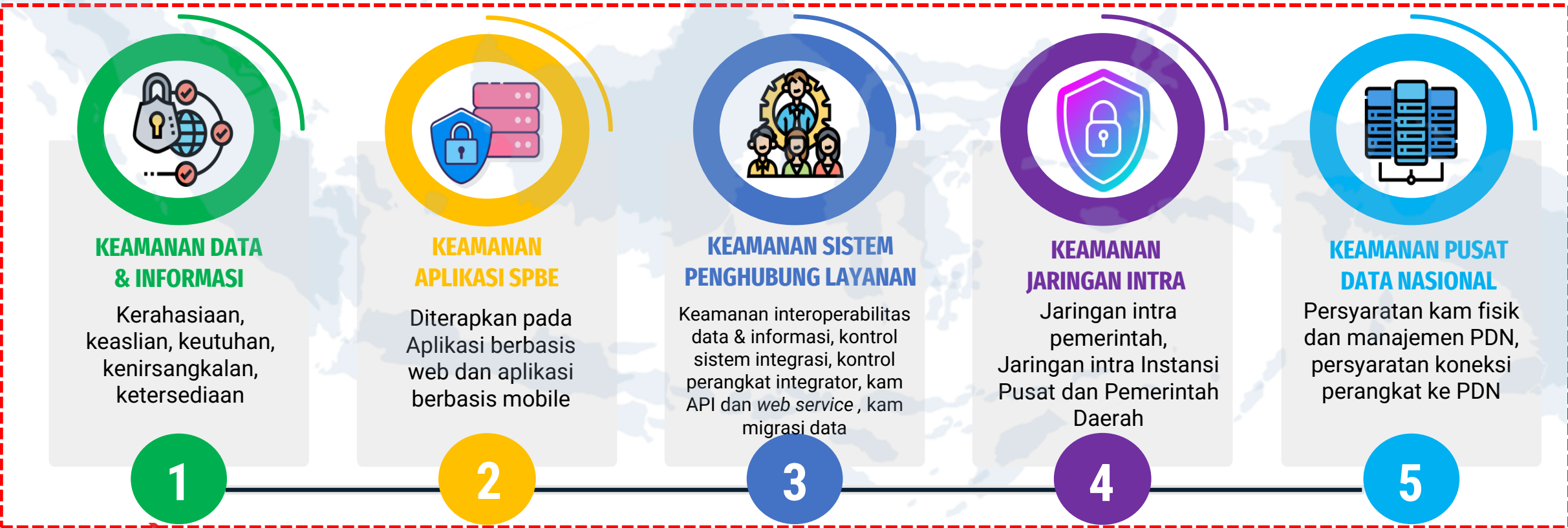
BAB III  
STANDAR TEKNIS DAN PROSEDUR KEAMANAN  
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK  
  
Bagian Kesatu  
Umum



Pasal 17  
  
(1) Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.  
  
(2) Penerapan Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.



Standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE diterapkan untuk:





## APLIKASI BERBASIS WEB

"Aplikasi yang diakses melalui peramban saat terhubung dengan koneksi internet atau intranet"

- **Autentikasi**
- **Manajemen sesi**
- **Persyaratan control akses**
- **Validasi input**
- **Kriptografi pada verifikasi statis**
- **Penanganan eror dan pencatatan log**
- **Proteksi data**
- **Keamanan komunikasi**
- **Pengendalian kode berbahaya**
- **Logika bisnis**
- **File**
- **Keamanan API dan *web service***
- **Keamanan konfigurasi.**

## APLIKASI BERBASIS MOBILE

"Aplikasi yang dalam pengoperasiannya dapat berjalan di perangkat bergerak dan memiliki sistem operasi yang mendukung perangkat lunak secara *standalone*."

- **Penyimpanan data dan persyaratan privasi.**
- **Kriptografi.**
- **Autentikasi dan manajemen sesi.**
- **Komunikasi jaringan.**
- **Interaksi platform.**
- **Kualitas kode dan pengaturan build, dan**
- **Ketahanan.**



*“(Ingatlah) Kechilafan Satu Orang Sahaja  
Tjukup Sudah Menyebabkan Keruntuhan Negara”*



**Mayjen TNI (Purn) dr. Roebiono Kertopati  
(1914 - 1984)**

**Bapak Persandian Republik Indonesia**